

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga (DISBUDPARPORA) Kabupaten Sampang, pasalnya beberapa objek wisata kota bahari tersebut tidak terawat dan ada yang dalam sengketa, masyarakat dan para mahasiswa kecewa dengan kinerja Disbudparpora. Salehuddin menyebutkan beberapa objek wisata yang tidak terawat diantaranya, yaitu; Sumber Otok, Waduk Klampis dan Makam Rato Ebu. Menanggapi hal itu, Kepala Disbudparpora Kabupaten Sampang Djuwardi mengatakan pihaknya terkendala anggaran pemerintah provinsi dan pusat, serta minimnya investor untuk mendukung dan mengembangkan lokasi pariwisata di kota bahari. Apabila wisata bahari tidak diperbaiki maka tempat tersebut akan kumuh dan pengunjung menyusut drastis.

Perencanaan menurut Indahsari (2010:4) Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Di Indonesia perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah diatur dalam beberapa produk perundang-undangan.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tegas mengemukakan bahwa aspek penting yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budget*) oleh

pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antara pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu satu tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran terukur beserta rincian pendanaanya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Rensra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD di dasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan paguindikatif masing-masing SKPD;

- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan paguindikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. (Permendagri No 54 tahun 2010)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dan batasan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis penyusunan rencana kerja (Renja) dan penganggaran pagu indikatif dinas Disbudparpora Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya observasi ini ialah penulis ingin mengetahui cara kerja yang dilakukan oleh DISBUDPARPORA Kabupaten Sampang tentang bagaimanakah menganalisis penyusunan rencana kerja (Renja) dan penganggaran pagu indikatif dinas Disbudparpora Kabupaten Sampang.

Tujuan dari observasi ini adalah ketika karya ilmiah ini selesai dibuat penulis menginginkan masyarakat umum khususnya yaitu masyarakat Kabupaten Sampang dapat mengetahui bagaimana analisis penyusunan perencanaan kerja dan anggaran di suatu dinas DISBUDPARPORA Kabupaten Sampang beserta hasil realisasinya dalam melaksanakan pelayanan publik,

sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun perencanaan kerja periode selanjutnya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Observasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang lainnya:

1. Bagi (DISBUDPARPORA) Kabupaten Sampang

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam memperbaiki sistem dan analisis penyusunan perencanaan kerja dan anggaran yang ada pada DISBUDPARPORA, dan dijadikan sebagai referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

2. Bagi Penulis atau Mahasiswa

Disamping untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian tugas akhir tentang analisis penyusunan rencana kerja dan penganggaran pagu indukatif pada program Diploma D3 Akuntansi Sektor Publik Universitas Trunojoyo Madura dan sebagai bahan penyempurnaan kurikulum pada periode selanjutnya, penelitian ini banyak menambah wawasan penulis. Penulis yang selama ini berada dibangku kuliah belum pernah mengikuti atau terlibat dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pada analisis penyusunan rencana kerja dan penganggaran pagu indikatif Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISBUDPARPORA). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi DISBUDPARPORA Kabupaten Sampang dalam menentukan langkah-langkah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi

pembaca atau penulis yang berminat mengkaji atau membahas keberhasilan dan kegagalan pembangunan daerah khususnya dari segi perencanaan dan penganggaran.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih Kabupaten Sampang untuk dijadikan sebagai Objek penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang dilaksanakan saat ini. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1 Bulan lebih atau 7 Minggu di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISBUDPARPORA) Kabupaten Sampang yang dimulai pada Tanggal 05 Januari 2015 hingga 15 Februari 2015. Waktu pelaksanaan magang/PKL pada jam 07:00-13:30 WIB.